

---

## **Polarisasi Politik Antara Kepala Desa dengan Penyelenggara Pemilu: Studi Kasus Pemilu 2024 di Bangkalan**

**Ahmad Sukron**

Program Studi Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
(Email: ahmadsukron88@ub.ac.id)

### **Abstract**

This research aims to explore the process of political polarization between village heads and election organizers in Bangkalan Regency in the 2024 elections. Through this research, researchers want to explore how factors such as traditional patronage at the village level can create polarization of interests both in the process of forming PPS, KPPS and PKD, PTPS which boils down to personal interests and group interests. The research method used in this research is a qualitative approach with a case study through interview techniques, observation and documentation studies. The results of this study show that political polarization between village heads and election organizers. Vulnerability to political intervention has occurred in Bangkalan Regency, and efforts to avoid it require complex steps. To minimize the problem, several strategic efforts are needed, namely: a) Increasing the awareness of all parties involved. b) Maximizing the role of the village head in carrying out his duties as a policy maker at the village level, c) Increasing public participation and awareness of elections. With the implementation of these measures, the integrity of elections can be improved and public confidence in election results can be maintained.

### **Keywords:**

Political Polarization, Regional Head Election, Political Dynamics, Madura

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2024. Fokus penelitian adalah bagaimana patronase tradisional di tingkat desa menciptakan polarisasi kepentingan dalam pembentukan PPS, KPPS, PKD, dan PTPS yang cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kerentanan terhadap intervensi politik, yang memerlukan langkah-langkah strategis untuk menghindarinya, seperti peningkatan kesadaran semua pihak terkait, peningkatan kapasitas KPPS, peran maksimal kepala desa, serta peningkatan partisipasi publik dan kesadaran kepemiluan. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pemilu dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.

### **Kata Kunci:**

Polarisasi Politik, Pemilihan Kepala Daerah, Dinamika Politik, Madura

## **PENDAHULUAN**

Gerakan politik kepala desa semakin meningkat menjelang pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan. Fenomena ini tidak dapat dipandang remeh, terutama sebagai penanda bahwa politik di tingkat desa juga semakin kompleks dan berjalan mengiringi pola politik di tingkat nasional. Hal ini berpotensi menciptakan polarisasi politik yang berlebihan.

Menurut Schedler (2023), polarisasi terjadi ketika terdapat perbedaan pandangan politik yang sangat tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang terafiliasi dalam partai dan kepemimpinan politik yang berbeda atau terjadi saat adanya kubu-kubu politik yang saling bertentangan. Dalam hal ini, polarisasi gerakan politik kepala desa menjadi isu yang sangat krusial karena mereka merupakan figur yang memiliki andil besar dalam memimpin masyarakat desa dan berada di garis depan kegiatan politik di desa serta mempunyai relasi kuat dengan partai politik ditingkat daerah.

Pemilu merupakan ajang untuk menentukan arah politik ke depan. Terutama di tingkat desa, kepala desa bisa saja memanfaatkan momentum pemilu untuk menunjukkan kekuatan dan menggalang dukungan massa dengan cara yang kurang bijak. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab meningkatnya polarisasi gerakan politik kepala desa menjelang pemilu 2024 yang lalu di Kabupaten Bangkalan. Tidak hanya itu, pola pikir yang terkesan sempit juga menjadi penyebab polarisasi gerakan politik dalam pemilu 2024. Banyak kepala desa yang terjebak pada pemikiran bahwa hanya ada satu kelompok politik yang bisa diandalkan, sehingga mulai membatasi ruang lingkup demokrasi dan pluralisme dalam pemilihan umum.

Menurut Baker et al. (2020) adanya polarisasi dalam gerakan politik kepala desa dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap stabilitas politik di tingkat desa, terutama dalam konteks pelaksanaan pemilu. Beberapa temuan menunjukkan bahwa ketika polarisasi semakin tajam antara kepala desa dan penyelenggara pemilu, ketegangan sosial yang terjadi dapat memperburuk konflik antarwarga dan memicu perpecahan di komunitas desa. Hal ini sering kali berhubungan dengan pertarungan kekuasaan antara kelompok politik yang berbeda, yang menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak pada proses demokrasi di desa. Penyelenggaraan pemilu di tingkat desa tidak hanya bergantung pada transparansi dan netralitas penyelenggara, tetapi juga pada upaya meredam polarisasi yang dapat mengarah pada ketidakpercayaan publik terhadap institusi demokrasi, serta meningkatkan potensi konflik antarwarga desa (Gagnon & Lupu, 2021). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa polarisasi politik di tingkat lokal dapat mempengaruhi tidak hanya hasil pemilu, tetapi juga legitimasi dari pemimpin desa yang terpilih, sehingga berdampak pada kestabilan politik di tingkat daerah (Schmitt & Kofler, 2022).

Disisi lain, penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) harus mampu menjamin keberlangsungan pemilihan umum (eksekutif dan legislatif) 2024 yang aman, demokratis, dan transparan. Berbagai solusi dapat dilakukan, seperti peningkatan pemahaman masyarakat desa tentang pentingnya pemilu yang damai dan berintegritas serta perluasan wawasan para kepala desa tentang arti penting keberhasilan iklim politik yang demokratis dan stabil pada tingkat desa.

Namun upaya tersebut mendapatkan perlawanan dari oknum yang terdiri dari beberapa kepala desa yang merasa, bahwa pemilihan umum 2024 ditingkat desa merupakan tanggung jawab kepala desa, sehingga pembentukan perangkat pemilu ditingkat Desa seperti Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Panitia Pemungutan

Suara (KPPS), Pengawas Kelurahan atau Desa (PKD) dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang menjadi tanggung jawab KPU dan Bawaslu, ada potensi mau diambil alih oleh oknum kelompok kepala desa. Hal inilah yang menurut pengamatan awal penulis, telah terjadi konflik kepentingan yang berujung polarisasi politik antara kepala desa dengan penyelenggara pemilu ditingkat desa yang berdampak negatif pada stabilitas politik pemilu di tingkat desa, kecamatan bahkan di tingkat daerah Bangkalan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada konflik kepentingan politik antara Kepala Desa dan penyelenggara pemilu dalam Pemilu 2024 di tingkat desa yang berujung pada polarisasi politik di Kabupaten Bangkalan. Meskipun penelitian sebelumnya lebih banyak membahas polarisasi ideologi di tingkat nasional, sedikit yang mengkaji dampaknya di tingkat desa (Schedler, 2023). Penelitian oleh Baker et al. (2020) dan Gagnon & Lupu (2021) menunjukkan bahwa polarisasi tajam dapat memperburuk ketegangan sosial di komunitas lokal. Artikel ini menawarkan kebaruan dengan mengeksplorasi dinamika polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu serta dampaknya terhadap stabilitas politik dan legitimasi pemimpin desa (Schmitt & Kofler, 2022).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami polarisasi gerakan politik kepala desa dengan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan pada Pemilu 2024. Studi kasus menjadi pendekatan utama untuk mendalami fenomena tersebut, dengan analisis mendalam terhadap hubungan antara kepala desa, gerakan politik, dan penyelenggara pemilu melalui data yang dikumpulkan di tingkat desa hingga kabupaten. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh wawasan dari kepala desa, anggota gerakan politik lokal, dan penyelenggara pemilu. Wawancara ini bertujuan menggali perspektif mereka terhadap polarisasi politik, peran masing-masing dalam proses politik, serta interaksi selama pemilu berlangsung.

Selain wawancara, observasi langsung dilakukan untuk memahami dinamika politik di tingkat desa dan proses penyelenggaraan pemilu. Observasi ini dilakukan baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun analisis dokumentasi, melibatkan pengumpulan data dari kegiatan politik yang relevan. Dokumen-dokumen seperti kebijakan, regulasi, dan laporan pemilu sebelumnya dianalisis untuk memberikan konteks lebih luas terkait situasi politik. Data dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik seperti analisis naratif atau tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan, sehingga menghasilkan pemahaman mendalam tentang polarisasi politik dan penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bangkalan. Dengan menggabungkan beberapa metode dari (Creswell & Creswell, 2017; Seale, 2017), penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang polarisasi politik dan penyelenggaraan pemilu di tingkat desa dalam konteks Pemilu 2024 di Bangkalan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Bangkalan**

Kabupaten Bangkalan terletak di ujung barat Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki luas wilayah sekitar 1.260,14 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk yang beragam

dari segi budaya dan etnis. Wilayah ini terbagi menjadi 18 kecamatan yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, nelayan, dan pedagang, mencerminkan struktur sosial yang kuat berbasis komunitas lokal. Sebagai daerah yang dikenal dengan tradisi keagamaan yang kental, Kabupaten Bangkalan memiliki dinamika politik yang unik, sering kali dipengaruhi oleh relasi antara elit lokal dan masyarakat akar rumput. Kondisi geografis, budaya, dan sosial-ekonomi tersebut menjadikan Bangkalan sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji polarisasi politik, khususnya antara kepala desa dan penyelenggara pemilu dalam konteks Pemilu 2024.

### **Polarisasi Politik dan Penyelenggaraan Pemilu di Bangkalan**

Polarisasi politik merupakan fenomena yang menggambarkan pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok dengan pandangan politik yang berlawanan secara tajam. Fenomena ini dapat muncul akibat perbedaan pendidikan, agama, kesadaran kelas, atau lokasi geografis. Polarisasi politik tidak hanya memengaruhi dinamika sosial, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik yang mengancam stabilitas politik. Somer & McCoy (2019), menyatakan bahwa polarisasi dapat mendorong perilaku pemilih yang emosional, di mana preferensi pemilih didasarkan pada ikatan kelompok daripada penilaian obyektif terhadap kinerja kandidat. Kebijakan publik yang dianggap tidak adil juga sering memperburuk ketegangan politik, sehingga meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem demokrasi (Leipziger, 2024; Sahal et al., 2018; Soares et al., 2021).

Dalam konteks politik lokal, kepala desa memainkan peran penting tidak hanya sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai aktor politik yang memengaruhi preferensi politik masyarakatnya. Kepala desa bertugas menjalin komunikasi dengan pemerintah kabupaten, menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengambil langkah strategis untuk mengatasi konflik sosial di desa. Selain itu, kepala desa juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Utami & Munandar (2021), keterlibatan kepala desa dalam dinamika politik sering kali bersifat transaksional, yang dapat memicu konflik kepentingan, khususnya dalam konteks pemilu. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas politik di tingkat lokal.

Di sisi lain, penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemilu berlangsung secara adil, transparan, dan demokratis. Penyelenggara bertanggung jawab mengatur mekanisme pemilu, mempersiapkan logistik dan sumber daya manusia, serta mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan pemilu. Antlöv & Cederroth (2021), menekankan bahwa profesionalisme dan netralitas penyelenggara sangat penting untuk menjaga integritas pemilu. Selain itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bertujuan untuk mencegah pelanggaran, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin hasil pemilu yang kredibel.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada kolaborasi antara penyelenggara, kepala desa, dan masyarakat. Partisipasi masyarakat yang aktif menjadi salah satu elemen kunci dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Penyelenggara pemilu juga perlu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk mendukung transparansi dan meminimalkan risiko kecurangan. Dalam konteks ini, kepala desa diharapkan mampu memainkan perannya sebagai mediator antara masyarakat dan penyelenggara pemilu untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar. Dengan kerja sama yang

solid dan komitmen semua pihak, pemilu dapat menjadi landasan bagi demokrasi yang berkelanjutan dan legitimasi pemerintahan yang terpilih.

Polarisasi gerakan politik desa di Bangkalan adalah suatu permasalahan yang mengindikasikan besarnya pengaruh politik dalam kehidupan masyarakat di desa tersebut. Polarisasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan visi dan misi dari para tokoh politik di desa, adanya kepentingan pribadi dalam mencapai jabatan, serta adanya pemecahan kekuasaan berdasarkan identitas atau kelompok tertentu yang berbeda. Bahkan Demokrasi pada hakikatnya tidak cocok untuk struktur masyarakat yang multietnik karena hampir mustahil institusi yang bebas berlangsung dalam negara yang mempunyai nasionalitas yang berbeda

Pada setiap desa di Bangkalan, ada beberapa kelompok politik yang berbeda dengan memiliki kepentingan masing-masing dalam mencapai tujuannya. Kelompok-kelompok tersebut umumnya memiliki tujuan yang beragam, mulai dari mencapai kekuasaan hingga mencapai keuntungan pribadi. Penyebab terjadinya polarisasi gerakan politik desa di Bangkalan dikarenakan adanya perbedaan pandangan dan misi antara kelompok politik yang ada di masyarakat desa (hasil wawancara dengan informan). Perbedaan politik dan tergabungnya kepala desa sebagai tim pemenang dalam pemilu eksekutif maupun legislatif, menyebabkan kepala desa harus terlibat dalam politik praktis, salahsatu contohnya adalah tarik menarik kepentingan dalam pembentukan perangkat sistem pemilu ditingkat desa, baik dari KPU tingkat desa (PPS dan KPPS) maupun bawaslu ditingkat desa (PKD dan PTPS) (data: temuan di lapangan). Pada akhirnya, hal ini menyebabkan keterbelahan antara Penyelenggara pemilu ditingkat desa (PPS, KPPS, PKD dan PTPS) dengan kepala desa dan perangkatnya dalam menentukan desain atau tehnik pemilu ditingkat desa.

### **Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan**

Polarisasi gerakan politik di desa-desa Kabupaten Bangkalan merupakan fenomena yang semakin relevan dalam konteks Pemilu 2024. Polarisasi ini dipicu oleh perbedaan kepentingan politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu, terutama dalam pembentukan perangkat pemilu seperti PPS, KPPS, PKD, dan PTPS. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada proses pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik di tingkat lokal. McCoy et al., (2018) menyatakan bahwa polarisasi tajam dapat memicu fragmentasi sosial yang berujung pada konflik di komunitas lokal, terutama ketika isu-isu politik diperkuat oleh identitas kelompok. Selain itu, Schedler (2023) menjelaskan bahwa polarisasi di tingkat akar rumput sering kali memperburuk kinerja demokrasi karena mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus. Dalam konteks ini, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis menjadi salah satu penyebab utama perpecahan di tingkat desa.

Sebagai pemimpin lokal, kepala desa memiliki peran strategis dalam mengelola hubungan antara masyarakat desa dan pemerintah daerah. Mereka berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengimplementasikan kebijakan pemerintah di tingkat desa. Namun, dalam realitas politik lokal, kepala desa sering kali terlibat dalam dinamika politik yang kompleks dan terkadang transaksional. Kuncoro (2013) mencatat bahwa hubungan kekuasaan antara kepala desa dan pemerintah daerah sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang mengakibatkan lemahnya batas antara birokrasi dan politik. Di sisi lain, kepala desa juga

berperan sebagai tokoh politik lokal yang memengaruhi preferensi politik masyarakat desa, seperti yang dijelaskan oleh Somer & McCoy (2019), bahwa aktor politik lokal sering kali menjadi mediator utama dalam membentuk orientasi politik komunitas di wilayah terpencil. Dalam konteks ini, keterlibatan kepala desa dalam politik praktis dapat meningkatkan risiko konflik kepentingan, terutama ketika mereka mendukung salah satu pihak dalam pemilu.

Pengaruh dinamika politik lokal terhadap kinerja kepala desa dapat bervariasi, tergantung pada bagaimana kepala desa mengelola hubungan dengan aktor-aktor politik lainnya. Kepala desa yang memiliki keterampilan politik yang baik sering kali mendapatkan dukungan yang lebih besar dalam pelaksanaan program desa. Namun, dalam banyak kasus, intervensi politik lokal justru menyebabkan konflik, seperti praktik korupsi dalam pelaksanaan proyek desa. McCoy, (2023) menekankan bahwa polarisasi politik yang dipicu oleh konflik kepentingan dapat merusak kredibilitas pemimpin lokal dan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Polarisasi ini juga berkontribusi pada lemahnya tata kelola lokal, yang semakin memperburuk kondisi demokrasi di tingkat desa.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kendala teknologi dan sumber daya manusia. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya literasi digital masyarakat desa, yang mempersulit penyelenggara pemilu dalam menyosialisasikan informasi terkait pemilu. Hal ini diperburuk oleh keterbatasan jaringan telekomunikasi di banyak wilayah pedesaan di Bangkalan. Schedler (2023) mencatat bahwa ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi dapat memperburuk ketimpangan partisipasi politik, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, kurangnya kompetensi SDM penyelenggara pemilu menyebabkan kesalahan teknis yang berujung pada pelanggaran aturan, seperti ditemukan dalam berbagai kasus pemilu sebelumnya di wilayah ini. Dalam situasi seperti ini, Somer et al., (2021) merekomendasikan pelatihan intensif bagi petugas pemilu untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu.

Untuk mengatasi kendala ini, berbagai langkah telah diambil oleh penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan. Pelatihan bagi petugas pemilu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang mekanisme dan etika pemilu, seperti yang direkomendasikan oleh McCoy et al., (2018), bahwa pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya menciptakan stabilitas politik melalui dialog aktif antara kepala desa dan penyelenggara pemilu. Dialog semacam ini tidak hanya membantu meredakan ketegangan, tetapi juga mendorong terciptanya konsensus yang lebih luas di tingkat lokal. Schedler (2023) mencatat bahwa upaya memperkuat komunikasi antara aktor politik lokal dapat secara signifikan mengurangi risiko konflik dalam proses demokrasi.

Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan tidak hanya menjadi ujian bagi kualitas demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga menjadi momen penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di desa-desa. Kerjasama antara kepala desa, penyelenggara pemilu, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga integritas dan keberhasilan pemilu. Dalam konteks ini, kepala desa diharapkan dapat memainkan peran sebagai mediator yang efektif dalam mengatasi polarisasi politik, sementara penyelenggara pemilu perlu terus menjaga netralitas mereka. Keberhasilan pemilu sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat serta komitmen dari semua pihak

yang terlibat untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi (J. McCoy, 2023). Dengan demikian, melalui kerjasama yang solid dan transparansi yang tinggi, diharapkan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan lancar dan demokratis.

### **Polarisasi Antara Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemilu di Bangkalan**

Pemilihan umum (pemilu) adalah acara demokratis yang diadakan untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mewakili pemerintah di tingkat nasional, provinsi, dan bahkan di tingkat daerah, seperti pada tingkat kabupaten dan kecamatan. Namun, polarisasi politik atau pilihan politik yang sangat berbeda antara kepala desa dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan menjadi perhatian serius bagi pelaksanaan pemilu 2024.

Kekuasaan kepala desa telah menjadi kunci untuk kesuksesan dalam pemilu, khususnya di daerah yang tingkat sumber daya manusianya masih tergolong rendah. Kepala desa seringkali mengetahui keadaan masyarakat, keinginan dan kebutuhan mereka, serta kondisi yang bisa mempengaruhi pilihan politik mereka. Dalam hal ini, kepala desa sangat penting untuk memastikan suksesnya pemilu di daerah tersebut. Namun, situasi menjadi rumit ketika kepala desa dituduh memihak atau mendukung salah satu kandidat atau partai politik tertentu.

Polarisasi politik antara kepala desa dengan penyelenggara pemilu dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Bangkalan dapat menjadi sebuah masalah serius yang berdampak pada kredibilitas dan keberhasilan pelaksanaan pemilu. Polarisasi politik menjadi isu yang semakin relevan dalam perkembangan politik di banyak negara di seluruh dunia. Bahkan fenomena polarisasi semakin kompleks dan bervariasi di seluruh dunia. Meskipun polarisasi politik bisa menjadi hal yang wajar dalam masyarakat demokratis, terlalu banyak polarisasi dapat mengancam stabilitas politik, kohesi sosial, dan proses pengambilan keputusan (Schedler, 2023).

Di Indonesia, polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu, terutama pada pemilihan umum di daerah pedesaan, menjadi masalah yang sangat penting. Polarisasi ini dapat menyebabkan kerentanan terhadap intervensi politik dan mengancam integritas serta kepercayaan publik pada hasil pemilihan itu sendiri. Polarisasi politik dalam pandangan sosiologis, terjadi ketika ada perbedaan pandangan politik. Perbedaan pendapat tersebut menimbulkan perpecahan dalam masyarakat yang diakibatkan oleh adanya pandangan politik yang berseberangan. Polarisasi politik dapat menyebabkan konflik dan ketegangan sosial yang lebih besar dalam masyarakat. Perpecahan politik yang tajam dapat menghasilkan polarisasi sosial yang mendalam dan mengancam stabilitas sosial (J. McCoy, 2023). Hal ini juga berpotensi terjadi di wilayah perkotaan maupun pedesaan, khusus pedesaan di Kabupaten Bangkalan.

Pada dasarnya, kepala desa merupakan tokoh penting dalam struktur pemerintahan desa. Mereka memiliki pengaruh yang cukup besar di masyarakat pedesaan. Di sisi lain, penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab untuk menjamin integritas dan keberlangsungan pemilihan umum di desa. Penyelenggara pemilu harus mengawasi kegiatan kampanye, penghitungan suara, serta pengumuman hasil pemilu. Persaingan politik yang semakin ketat di berbagai daerah menyebabkan polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu semakin sulit dihindarkan. Akibatnya, polarisasi politik antara kedua belah pihak menjadi masalah yang dapat mempengaruhi integritas pemilu serta kepercayaan publik pada hasil pemilihan itu sendiri. Persaingan

politik tersebut dapat menjadi bermacam-macam, seperti intervensi pada pelaksanaan tahapan pemilu, intimidasi terhadap pesaing politik, serta pemanfaatan sumber daya desa untuk kepentingan kampanye.

KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) memegang peran penting dalam menjamin integritas dan keberlangsungan pemilihan umum di desa. Meningkatkan kapasitas KPPS di tingkat desa dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh KPPS dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPPS di antaranya adalah kurangnya pemahaman tentang peran dan fungsi serta minimnya keterampilan teknis dalam pengolahan data pascapemungutan suara. Peningkatan kapasitas KPPS di desa dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab KPPS, protokol keamanan, pengolahan data pascapemungutan suara, serta kemampuan teknis lainnya. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, KPPS dapat menjamin keberlangsungan dan keabsahan pemilihan umum di desa.

Selain peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu, kepala desa juga dapat memainkan peran penting dalam meminimalisir polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu. Kepala desa dapat memaksimalkan perannya sebagai mediator antara penyelenggara pemilu dan masyarakat desa. Mereka dapat mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menjamin terwujudnya partisipasi publik, serta mendukung penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugasnya. Penguatan peran kepala desa dapat dilakukan dengan memaksimalkan peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam meningkatkan partisipasi publik dan mengawasi jalannya tahapan pemilihan umum di tingkat desa. Kepala desa juga dapat memperkuat peran mereka dalam mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum.

Partisipasi publik dapat mencegah terjadinya polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu. Meningkatkan partisipasi publik dapat tercipta melalui edukasi dan sosialisasi pada masyarakat desa tentang pentingnya partisipasi publik dalam pemilihan umum. Dengan meningkatnya partisipasi publik, masyarakat desa akan semakin peduli dan memahami betapa pentingnya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Tidak hanya itu, partisipasi publik yang meningkat dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan tahapan pemilu serta mendorong penyelenggara pemilu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan adil. Dengan demikian, tahapan pemilihan umum dapat berjalan dengan langsung, umum bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil(jurdil).

Oleh sebab itu untuk mewujudkan pemilihan umum yang luber dan jurdil, kerjasama antara kedua belah pihak serta kesadaran masing-masing pihak dalam menjalankan tugas tanpa melibatkan intervensi politik, sangat diperlukan. Polaritas politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu dapat diminimalisir melalui interaksi dan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak. Demikian juga, partisipasi publik yang tinggi serta partisipasi BPD akan membantu mencegah intervensi politik dan meningkatkan integritas dan kepercayaan masyarakat pada pemilihan umum.

Pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2024 yang yang lalu, sangat nampak kepentingan elit lokal dengan terlibat langsung dalam pemilu ditingkat desa. Dan pada pemilukada Kabupaten Bangkalan dimasa mendatang, penyelenggara pemilu dan kepala desa harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak dipengaruhi oleh polarisasi politik. Ini penting supaya masyarakat bisa menggunakan hak suara mereka dengan bebas dan jujur.



## **Kesimpulan**

Polarisasi politik antara kepala desa dan penyelenggara pemilu di Kabupaten Bangkalan dalam Pemilu 2024 merupakan fenomena yang signifikan dan memiliki implikasi besar terhadap stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal. Polarisasi ini dipicu oleh perbedaan kepentingan, baik pribadi maupun kelompok, dalam pembentukan perangkat pemilu di desa, yang memperbesar risiko konflik politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepala desa, yang berperan penting sebagai tokoh politik lokal, sering kali terjebak dalam dinamika politik praktis, sehingga memengaruhi netralitas dan transparansi penyelenggaraan pemilu.

Penelitian ini menyoroti bahwa kolaborasi yang kuat antara kepala desa, penyelenggara pemilu, dan masyarakat merupakan kunci utama untuk mengatasi tantangan tersebut. Penyelenggara pemilu memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sumber daya manusia, sementara kepala desa dapat berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan dan memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip adil, jujur, dan transparan.

Selain itu, pentingnya peningkatan partisipasi publik menjadi sorotan utama dalam upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui edukasi dan sosialisasi yang komprehensif, polarisasi politik di tingkat desa dapat diminimalkan. Melalui kerja sama yang solid dan kesadaran bersama terhadap pentingnya pemilu yang berintegritas, diharapkan pemilu di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan lancar dan menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang sehat dan inklusif.

## **Daftar Pustaka**

- Antlöv, H., & Cederroth, S. (2021). Elections in Indonesia. *The New Order and Beyond*.
- Baker, S., Henderson, M., & Miller, E. (2020). Political Polarization and Its Impact on Social Stability in Local Governance. *Journal of Political Analysis*, 45(3), 123–138. <https://doi.org/10.1016/j.polanal.2020.05.001>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Gagnon, L., & Lupu, L. (2021). Local Elections and Political Polarization: Consequences for Political Stability. *Local Government Studies*, 47(6), 758–774. <https://doi.org/10.1080/03003930.2021.1893319>
- Kuncoro, B., & others. (2013). *HUBUNGAN DESA DAN NEGARA: Studi Relasi Kekuasaan Kepala Desa dan Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pasca Orde Baru*. Universitas Airlangga.
- Leipziger, L. E. (2024). Does Democracy Reduce Ethnic Inequality? *American Journal of Political Science*, 68(4), 1335–1352.
- McCoy, J. (2023). Hyper-polarization and the security of democracy. In *Handbook on Democracy and Security* (pp. 165–187). Edward Elgar Publishing.
- McCoy, J. L., Rahman, T., Somer, M., McCoy, J. L., & Luke, R. E. (2021). Pernicious

- polarization, autocratization and opposition strategies. *Democratization*, 28(1), 929–948. <https://doi.org/10.1080/13510347.2021.1902606>
- McCoy, J., Rahman, T., & Somer, M. (2018). Polarization and the global crisis of democracy: Common patterns, dynamics, and pernicious consequences for democratic polities. *American Behavioral Scientist*, 62(1), 16–42. <https://doi.org/10.1177/0002764218759576>
- Sahal, M., Musadad, A. A., & Akhyar, M. (2018). Tolerance in multicultural education: A theoretical concept. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 5(4), 115–122.
- Schedler, A. (2023). Rethinking political polarization. *Political Science Quarterly*, 138(3), 335–359.
- Schmitt, D., & Kofler, C. (2022). Polarization, Local Governance, and Political Instability: The Case of Rural Indonesia. *Journal of Political Science*, 67(2), 221–235. <https://doi.org/10.1007/jpsci.2022.01234>
- Seale, C. (2017). Digital social research. *Researching Society and Culture*, 321.
- Soares, L. B., Costa, C. C., de Araújo, A. B., & Araújo, A. (2021). *Deliberative democracy in multicultural societies: The challenges of effectiveness, legitimacy, and equality*. University of Westminster Press.
- Somer, M., & McCoy, J. (2019). Transformations through polarizations and global threats to democracy. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 681(1), 8–22. <https://doi.org/10.1177/0002716218818056>
- Utami, D., & Munandar, M. A. (2021). Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Penguatan Potensi Lokal. *Unnes Political Science Journal*, 5(1), 11–14. <https://doi.org/10.15294/upsj.v5i1.42367>